

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2018).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2015) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat

akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah ketidakseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan, salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah tingkat kemiskinan.

Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan kriteria dari BPS. BPS telah menetapkan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) sebagai kriteria pengukuran kemiskinan. Dimana pendekatan kebutuhan dasar tersebut berdasarkan batas pengeluaran minimum individu untuk mengkonsumsi makanan yang setara dengan 2100 kalori perhari dan konsumsi non makanan. Sehingga dapat dikatakan kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi konsumsi makanan dan non makanannya melalui pendapatan yang dimilikinya.

Laju pertumbuhan yang cepat membuat upaya mengurangi pengangguran secara politik lebih diterima. Pertumbuhan ekonomi akan menaikkan permintaan terhadap

output, menaikkan kapasitas produktif para pekerja, dan membuka lapangan baru. Semua akan bermuara pada peningkatan pendapatan para pekerja. Pendapatan yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pengeluaran, seperti pengeluaran terhadap penduduk, kesehatan dan pengembangan keahlian (pengurangan kemiskinan dan pengangguran).

Efektivitas dalam menurunkan jumlah tingkat kemiskinan merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor inti atau sektor andalan dalam pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah tingkat kemiskinan (Simatupang dan Saktyanu, 2017).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari pokok permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Pembangunan Manusia (IPM). Angka indeks Pembangunan Manusia (IPM), mencakup tiga komponen dasar yang mengukur kualitas hidup manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak di dalam masyarakat. Menurut beberapa penelitian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai peranan dalam mengurangi kemiskinan.

Dengan meningkatnya kualitas hidup manusia yaitu peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), maka akan meningkatkan produktifitas masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya masyarakat tersebut akan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan kualitas SDM untuk kabupaten/kota Kabupaten Tebo mengalami peningkatan tertinggi di kabupaten Tebo selama periode 2010-2013 sebesar 0,79 persen sedangkan Indeks Pembangunan Manusia terendah selama periode 2010-2013 adalah di kabupaten kerinci sebesar 0,55.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dilanjutkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara dalam (Tisna, 2014) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Menurut Wongdesmiwati dalam (Wahyudi, 2013) proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak

akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan tingkat kemiskinan. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana tingkat kemiskinan bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2015).

Tingginya persentase tingkat kemiskinan disuatu wilayah akan berpengaruh pada rendahnya daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini karena umumnya pendapatan tingkat kemiskinan tersebut sangat rendah sehingga dari segi pendapatan perkapita juga rendah, apalagi rata-rata jumlah anggota rumah tangga tingkat kemiskinan umumnya lebih banyak dari rumah tangga penduduk tidak miskin sehingga rata-rata pendapatan perkapita penduduk tersebut relative lebih rendah. Keadaan ini akan lebih parah lagi jika tingkat pengangguran di wilayah tersebut juga tinggi.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multidimensional. Pendekatan yang dilakukan dengan satu bidang ilmu tertentu belum cukup untuk menjelaskan makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajiankajian akademik adalah definisi

kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum (World Bank, 2004).

Pengertian dari kemiskinan sampai saat ini telah mengalami perluasan, karena semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi tetapi telah meluas sampai ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan juga dapat dikatakan dengan suatu keadaan seseorang ketika tidak mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan dan keahlian yang rendah, keterkucilan sosial karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

Singkatnya, kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan dalam materi pada sejumlah atau segolongan orang daripada standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan dalam Dewi, 2011). Ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang ditetapkan. Sedangkan kemiskinan relatif berkaitan dengan perbedaan tingkat pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui kondisi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan belanja langsung terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Kabupaten Tebo.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (World Bank, 2004). Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena

kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah penangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup, dan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh sebagian besar negara sedang berkembang serta merupakan salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Jumlah tingkat kemiskinan di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. BPS Provinsi Jambi menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Jambi periode Maret 2015-Maret 2019 secara relatif mengalami penurunan kecuali pada periode September 2014-September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Sedangkan secara absolut selama periode Maret 2015-Maret 2019 mengalami kenaikan jumlah tingkat kemiskinan dari 241,61 ribu orang pada Maret 2015 menjadi 274,32 ribu orang pada Maret 2019. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Wilayah	Persentase Tingkat Kemiskinan dalam persen
---------	--

	(%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jambi	8,86	8,41	8,19	7,92	7,60
Kerinci	8,16	7,48	7,45	7,07	7,12
Merangin	9,80	9,95	0,43	8,88	8,48
Sarolangun	10,29	9,33	5,87	8,73	8,45
Batanghari	10,69	10,79	10,33	10,23	9,75
Muaro Jambi	4,61	4,30	4,37	4,05	3,83
Tanjung Jabung Timur	14,17	12,76	12,58	12,38	11,54
Tanjung Jabung Barat	12,63	11,81	11,32	11,10	10,56
Tebo	7,12	6,87	6,79	6,58	6,47
Bungo	5,70	5,99	5,82	5,76	5,60
Kota Jambi	9,67	8,97	8,84	8,49	8,12
Kota Sungai Penuh	3,43	3,13	2,78	2,76	2,81

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tidak Provinsi Jambi daerah kabupaten pun mengalami yang namanya penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Tebo masih mengalami permasalahan yang cukup serius di bidang kemiskinan. Seperti yang jelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Tingkat Kemiskinan di Kab. Tebo 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Total (dalam Ribu Jiwa)	Persentase (%)
2015	315.053	22.570	7,11
2016	338.160	23.040	6,87
2017	363.698	23.180	6,76
2018	379.390	22.856	6,58
2019	396.832	23.603	7,12

Sumber: BPS Kab. Tebo

Meskipun pertumbuhan ekonomi yang dialami Kabupaten Tebo sejak tahun 2015– 2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,9 % tetapi tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan. Rata-rata tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo selama periode 2015 – 2019 merupakan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang.

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo tahun 2019 berjumlah 396.832 jiwa berdasarkan Data Tebo Dalam Angka BPS tahun 2018 berjumlah 379.390 jiwa, pada tahun 2017 berjumlah 363.698 jiwa, pada tahun 2016 berjumlah 338.160 jiwa, pada tahun 2015 berjumlah 315.053 jiwa.

Berdasarkan penelitian diatas memberikan suatu pemahaman terhadap pentingnya dilakukan suatu penelitian mengenai tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo. Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang kemiskinan di Kabupaten Tebo, dengan melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tebo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tebo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan fakto-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Tebo.
2. Secara praktis, dapat di jadikan bahan masukan dan informasi bagi pemerintah untuk keperluan perumusan kebijakan yang terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Tebo.